
BERTAHAN DI TENGAH KRISIS: PENDIRIAN UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA (UMI) MAKASSAR, 1945-1965

Anna Asriani Muchlis

Lembaga Lingkar, Makassar

Abstrak

Ide membangun Universitas Islam di Makassar datang dari Prof. Huzairin, tokoh intelektual Islam di Jakarta dan salah satu pengurus Universitas Islam Djakarta (UID). Ide ini diteruskan oleh Naziruddin Rahmat yang merupakan pegawai Kementerian Agama yang dikirim ke Makassar, dengan membangun Universitas Muslim Indonesia (UMI). Melalui proses yang dimulai sejak tahun 1952 dan dengan bantuan tokoh-tokoh setempat, tanggal 23 Juni 1954 diresmikanlah UMI dan tahun 1955 Yayasan Wakaf UMI dibentuk. Mochtar Lintang yang dipercaya menjadi Presiden pertama UMI tidak menyelesaikan masa periodenya dikarenakan keikut-sertaannya dalam gerakan PRRI/ Permesta. Inilah periode krisis pertama di UMI. Presiden kedua Abdurrahman Shihab mendapatkan tentangan dari para mahasiswa karena kebijakan yang dibuatnya yakni menyatukan fakultas-fakultas yang ada di UMI dengan yang ada di IAIN, dan merupakan krisis kedua yang terjadi di UMI. Terlepas dari itu semua, UMI dengan segala perkembangannya berhasil melalui berbagai krisis masa lalu.

Kata kunci : Makassar, sejarah, pendidikan tinggi, UMI, krisis

Abstract

The idea to establish an Islamic university in Makassar came from Prof. Huzairin, a prominent Islamic intellectual in Jakarta and one of the leaders of Universitas Islam Djakarta (UID). The idea was followed by Naziruddin Rahmat who was a staff of the Ministry of Religion who was assigned to Makassar by establishing Universitas Muslim Indonesia (UMI). With the support of South Sulawesi community leaders in Makassar the process which started in 1952 finally led to the establishment of UMI on June 23rd 1954. The following year the Waqaf Foundation of UMI was established. However, Mochtar Lintang who was entrusted to become the first President of UMI could not finish his tenure due to his involvement in the PRRI/ Permesta rebellion. This period constituted UMI's first crisis. The second president, Abdurrahman Shihab, faced challenges from students when he tried to reorganize departments within the university and merged them with similar departments in the National Islamic Religious Institute (IAIN). This was UMI's second crisis. Despite all these challenges, UMI could thrive and develop beyond past difficulties.

Keywords: Makassar, history, higher education, UMI, crisis

PENDAHULUAN

Makassar antara tahun 1954-1965 bisa dilihat dalam dua aspek. Pertama bahwa pemerintah sedang menggalakkan berbagai pembangunan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat, seperti pendirian sekolah dan perguruan tinggi (bahwa pada kisaran tahun 1950 sudah ada beberapa sekolah dan Perguruan Tinggi (Fakultas) bermunculan di Kota Makassar. Misalnya Tahun 1951 Universitas Sawerigading didirikan untuk mencapai suatu universitas yang lengkap di Kota Makassar. Kemudian berlanjut dengan didirikannya beberapa universitas yang lain seperti UMI, Universitas Hasanuddin (UNHAS), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan sebagainya. Selengkapnyapun dapat dilihat dalam buku Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia Propinsi Sulawesi* (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1952), hlm. 496. Lihat pula Mardanas Safwan & Sutrisno Kutoyo (Editor), *Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan* (Ujung Pandang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980/1981), hlm. 118). Salah satu pembangunan yang dilakukan di sini adalah pendirian Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) di tahun 1953 ("Wakaf Pembangunan Universitas Muslim Indonesia", Pedoman Rakyat, 10 Februari 1953, hlm. 3). Pandangan yang kedua dan berlawanan dengan kondisi yang pertama yaitu timbulnya berbagai jenis pergolakan di daerah-daerah yang memprotes kebijakan pemerintah pusat di Jakarta. Dimulai dari yang sering disebut Peristiwa Andi Aziz, yang mengacu kepada nama Kapten pasukan KNIL di Sulawesi Selatan Aziz, yang memimpin sekitar 300 orang pasukannya menyerang barak CPM dan TNI, memprotes pengiriman satu batalyon pasukan TNI ke Sulawesi Selatan, yang terjadi pada tanggal 5 April 1950.

Sehabis itu, tentara yang lain bernama Kahar Muzakkar, yang baru saja

tiba dari Jakarta, bertemu dengan para gerilyawan yang statusnya tidak jelas dengan adanya kebijakan rasionalisasi tentara. Untuk mewartakan para gerilyawan tersebut, Kahar menuntut kepada Kolonel Kawilarang yang adalah Panglima Teritorial VII Indonesia Timur, untuk membentuk Resimen Hasanuddin di bawah pimpinannya. Permintaan tersebut ditolak, membuat Kahar pergi ke wilayah pegunungan pada Juli 1950, bergabung dengan para gerilyawan dan pasukan lain yang mendukungnya dan mengadakan perlawanan selama 15 tahun, dalam berbagai dinamika perundingan dengan pemerintah pusat. Setahun setelah masuk hutan, Tuntutan awal Kahar sepertinya akan dipenuhi, dengan terlebih dahulu dijadikan komandan CTN Sulawesi Selatan. Ketidaksepakatannya terhadap pembentukan CTN tersebut kemudian menandai perlawanan yang berlangsung lama terhadap pemerintah pusat. Tiga tahun setelah masuk hutan, Kahar mengumumkan bergabung ke dalam Darul Islam.

Belum lagi selesai persoalan dengan Kahar, dari dalam tubuh tentara di Sulawesi, muncul tuntutan Permesta (singkatan dari Piagam Perjuangan Semesta Alam), pada tahun 1957. Gerakan ini lebih banyak menuntut otonomi daerah (Harvey, 1989: 2). Utamanya di bidang pembangunan ekonomi, seperti Indonesia Timur merupakan daerah perdagangan barter dengan 70 persen hasilnya diperuntukkan bagi daerah itu dan 30 persen bagi pemerintah pusat. Tetapi kenyataan yang terjadi selama ini, pembagian antara daerah dan pusat sangatlah tidak seimbang. Pusat mendapatkan 70 persen dari yang dihasilkan Indonesia Timur sedangkan daerah yang menghasilkan sebagian kecil saja yaitu 30 persen.

Ketidakterataan kebijakan antara pusat dan daerah inilah yang mendorong para pejuang Permesta melakukan perlawanan. Pejuang Permesta menginginkan bahwa pusat tidak lagi mendominasi

daerah Indonesai Timur. Pejuang Perme-sta menganggap bahwa pusat hanya mem-buat beban yang memungut secara berle-bihan penghasilan di daerah.

Selain itu, tujuan pemberontakan Permesta adalah supaya pemuda dan pe-mudi yang berprestasi dari Indonesia Timur dapat diterima sebagai mahasiswa di lembaga-lembaga pendidikan utama di dalam negeri, dan pengiriman para siswa-siswi Indonesia Timur ke luar negeri, se-suai dengan jatah yang ditetapkan untuk daerah Indonesia Timur. Pengisian ja-batan-jabatan penting oleh orang-orang yang mampu, jujur, kreatif, secara konsis-ten revolusioner dan mengabdikan diri kepada daerah dan sebagainya (Harvey, 1989: 260-261).

Peristiwa-peristiwa yang disebutkan sebelumnya, kemudian berpengaruh pada upaya awal untuk melakukan pemban-gunan, terutama dalam aspek pendidikan. Sebut saja misalnya, Mochtar Lintang yang terpilih sebagai presiden pertama di UMI, ternyata merupakan anggota dari gerakan Permesta (Abdul Rahim Amin, wawancara di Kampus satu UMI, 13-09-2011). Keterlibatan Mochtar Lintang dalam gerakan politik ternyata berdampak pada awal pembangunan UMI. Hal inilah yang mendasari untuk meneliti secara spe-sifik pada pendirian Universitas Muslim Indonesia dan kontestasi politis di dalam-nya yang penulis istilahkan sebagai “krisis”. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis memilih batasan temporal 1954-1965 karena masa ini merupakan periode pertumbuhan UMI, masa percobaan, masa ia baru mulai merangkak agar bisa berdiri dan berjalan sebagaimana layaknya perguruan tinggi lainnya. Ten-tunya periode awal ini membutuhkan banyak perhatian dan kepedulian untuk bisa sejajar dan diperhitungkan dalam kancah dunia pendidikan. UMI benar-benar mengalami krisis yang membuat pengurus kelimpungan, karena di tengah krisis tersebut mereka harus tetap bertahan

untuk mempertahankan eksistensinya. Agar lebih terfokus, maka penulis akan mencari jawab pertanyaan: Bagaimana sejarah berdirinya UMI di Kota Makas-sar? Dan Bagaimana pengaruh keadaan di UMI terhadap dinamika sosial-politik dalam kurun waktu 1954-1965.

BERDIRINYA YAYASAN WAKAF UMI

Universitas Muslim Indonesia didirikan pada tahun 1954 ketika Naziruddin Rah-mat ditugaskan oleh K.H. Wahid Hasyim Menteri Agama RI di tahun 1951 sebagai kepala Kantor Penerangan Agama Provinsi Sulawesi (dalam penulisan selan-jutnya daerah Sulawesi yang di maksud di sini adalah Sulawesi Selatan). Sebelum berangkat Ke Kota Makassar, Naziruddin Rahmat bertemu dengan Prof. Dr. Mr. Hazairin dalam satu acara perpisahan. Prof. Dr. Mr. Hazairin berpesan kepada Naziruddin Rahmat apabila kedudukan sebagai Kepala Kantor Penerangan Agama Propinsi Sulawesi di Kota Makas-sar sudah agak mengizinkan hendaklah mendirikan dan membina satu universitas Islam di Indonesia bagian Timur (Prof. Dr. Mr. Hazairin adalah seorang tokoh intelektual Islam di Jakarta dan meru-pakan salah satu pengurus Universitas Islam Djakarta (UID) di tahun 1951. Pesan yang disampaikan oleh Prof. Dr. Mr. Huzairin sepertinya bukan tanpa ala-san, mengingat beliau adalah salah satu pengurus UID dan turut terlibat dalam proses pendiriannya. Lebih menariknya lagi pencetus ide pertama pendirian UID ini adalah kerabat dekat Naziruddin Rah-mat. Dia adalah A.S.W.S. Daron, seo-rang direktur sebuah usaha pengangkutan, dengan nama N.V. Idoco (Indonesian Campany). Bermula dari ide awalnya dengan mengajak bekerja sama untuk mendirikan sebuah gerakan pemuda Islam dengan nama AMI (Angkatan Muda Is-lam), yang kemudian berlanjut pada keinginannya mendirikan sebuah Univer-

sitas Islam di Jakarta. Untuk merealisasikan idenya ia dan kawan-kawannya menghubungi pemuka-pemuka intelektual Islam. Dan akhirnya atas izin Allah, ide A.S.W.S Darono mendirikan sebuah universitas Islam berhasil membawa nama-nama besar intelektual Islam pada saat itu, diantaranya: Mr. Sujono Harjosudiro, Dr. M. Yusuf Alfian Helmi, Prof. Dr. Mr. Hazairin, Prof. Dr. Sumedi, Prof. Dr. Abdurrahman, Mohd. Zein Jambek, Prof. Mahmud Yunus dan lain-lain. Lihat Naziruddin Rahmat, "Mendirikan Sebuah Universitas di Makassar" Universitas Muslim Indonesia", Manuskrip, 1990, hlm. 1).

Pada Tanggal 9 Mei 1952, Naziruddin Rahmat untuk pertama kalinya menemui raja-raja di Sulawesi, bersama dengan Kapten Anwar Bey, Sewang Daeng Muntu, dan Muhammad Yusuf Samah. Mereka bertemu dengan Raja-raja Sulawesi seperti Andi Mappanyukki (Raja Bone), Andi Djemma (Raja Luwu), Andi Idjo (Raja Gowa) dan Pajonga Karaeng Polongbangkeng. Selain menemui para raja, mereka juga menemui Gubernur Sulawesi yakni Sudiro, Walikota Makassar, Ahmad Dara Syahrudin, dan para alim ulama. Pada pertemuan ini didapatkan hasil yang positif bahwasanya para raja-raja, gubernur, walikota dan para ulama Islam menyetujui gagasan mendirikan universitas Islam, dan berjanji akan membantu dengan moril dan material (Tentang tokoh-tokoh seperti Naziruddin Rahmat, Sewang Daeng Muntu, Muhammad Yusuf Samah dan lainnya. Akan dijelaskan di halaman berikutnya).

Pada Tanggal 8 Februari 1953 dilaksanakan rapat panitia untuk pembentukan susunan pengurus Yayasan Wakaf UMI ("Wakaf Pembangunan Universitas Muslim Indonesia", *Pedoman Rakyat*, 10 Februari 1953, hlm. 3). Pada 28 Februari 1953 struktur kepengurusan Yayasan Wakaf UMI dibentuk antara lain Ketua kehormatan: Andi Idjo, Ketua Umum:

Sutan Muhammad Yusuf Samah, Ketua: H. Sewang Daeng Muntu, Ketua II: Naziruddin Rahmat, Sekretaris Umum: Abdul Waris, Sekretaris I: Sakkai Rakka, Sekretaris II: Maddaramang, Ketua Dewan Keuangan: Abdul Gaffar Gustaman, Pembantu-pembantu: Maddolangeng, H. Darwis Zakaria, H. Syukri, H. Muclis, H. Idris Daeng Kulle, H. Lontang, Gazali Tahib, Andi Basa, Haeba Daeng Situdju, Muhammad Salah Daeng Mattiri, Muhammad Noor, Muhammad Bardjo, Abbas Daeng Mallawa, Tjia Goan Liem, Sitti Ebong, Pelindung: Andi Mappanyukki, Andi Djemma, Pengawas: Sudiro, Ahmad Dara Sjahrudin, Lanto Daeng Pasewang, Abdul Razak Baginda, Anwar Bay, Ahmad Bone, Sikado Daeng Nai, Mukdan, dan Penasehat: Pakki Daeng Masiga, Insinyur Paramudji, Dokter Hasan, Dokter Sukasno, Teuku Sani, Nuhung Daeng Nompoo, H. Mansur Daeng Tompo, Sjamsuddin Daeng Magawing, Hamarung Daeng Magassing.

Pada pertengahan tahun 1953 kuliah pertama diadakan bertempat di emperan Kantor Penerangan Agama Propinsi Sulawesi di Jalan Karebosi. Kementerian Agama memberikan bantuannya dengan menetapkan Dr. Hamka sebagai dosen terbang dari Jakarta. Selain itu, didatangkan pula seorang tamu dari Malaysia yaitu Prof. Dr. Zainal Abidin Ahmad dari Malayan University di Singapura. Beliau memberikan 2 kali kuliah di UMI tentang sejarah orang-orang Bugis di Tanah Melayu dan beliau termasuk Guru Besar Bahasa Melayu di Malayan University.

Tidak dapat dipungkiri bahwa UMI berasal dari sebuah wakaf pembangunan UMI, yang dikemudian hari dialihkan menjadi sebuah badan hukum yang berbentuk yayasan "Wakaf UMI". Pada saat UMI disahkan secara resmi, untuk pertama kalinya dibentuklah organisasi dan manajemen beserta dengan susunan struk-

tur kepengurusannya, dengan susunan bagian-bagiannya. Jadi struktur kepengurusan UMI dan Yayasan Wakaf merupakan dua hal yang berbeda, dengan struktur yayasan berada di tingkat yang paling tinggi. Semua keputusan yang diambil oleh pimpinan Universitas harus melalui persetujuan pimpinan Yayasan Wakaf UMI.

Pada tahun 1955, H. Sewang Daeng Muntu, Naziruddin Rahmat, La Ode Manarfa, Sutan Muhammad Yusuf Samah dan H. Andi Patiwiri menghadap kepada seorang notaris Richard Claproth (Richard Claproth ialah notaris, yang bertempat tinggal di Kota Makassar. Beliau pernah juga membuat akte P.T. M. Parumpa & CO. Lihat "Pemberitahuan", *Marhaen*, 24 Desember 1959. Lihat pula "Pemberitahuan P.T. Makassar", *Marhaen*, 2 Januari 1960, hlm. 3). Pengesahan atas terbentuknya Yayasan Wakaf UMI dilakukan pada tanggal 28 Maret 1955 oleh notaris Richard Claproth (Direktori, *Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah IX Ujung Pandang* (Ujung Pandang: Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah IX, 1995), hlm.10. Lihat pula "Wakaf Pembangunan Universiteit Muslim Indonesia", *Pedoman Rakyat*, 10 Februari 1953: 10). Setelah dibentuk, yayasan ini membuat dan menetapkan pengurus yang nantinya bertugas.

Orang-orang yang termasuk dalam susunan kepengurusan Yayasan Wakaf ini dari latar belakangnya masing-masing merupakan anggota dari berbagai macam partai. Menariknya adalah ketika orang-orang sibuk melakukan gerakan pemberontakan atas nama Islam, orang-orang ini justru sibuk dengan usahanya membangun dan mendirikan PTI. Bagi umat Islam, tahun tersebut merupakan tahun-tahun kekecewaan dan frustrasi. Namun, di sisi lain terjadi perkembangan positif dalam tubuh umat Islam Indonesia dan sampai batas tertentu, perhatian umat

Islam telah beralih dari kehidupan serba-politik kepada masalah-masalah pendidikan, pengajaran agama, pengembangan Islam, dan publikasi bahan bacaan (Mastudi HS dan Marzuki Wahid, 2003: 37-38).

Para pemuka-pemuka agama yang ada di Kota Makassar pada saat itu, bisa dibilang termasuk ke dalam kelompok yang merasakan imbas positif tersebut. Latar belakang partai politik yang berbeda-beda dan melebur menjadi satu kesatuan adalah poin yang sangat menonjol, keegoisan dan kebanggaan terhadap partai sendiri ditinggalkan demi terciptanya suatu perguruan tinggi yang Islami. Selain itu, berafiliasinya para pengurus yang berbeda latar belakang tersebut dalam satu wadah di Yayasan Wakaf UMI, menunjukkan bahwa pada tahun tersebut bukanlah menjadi persoalan perbedaan latar belakang. Yang penting adalah usaha yang dilakukan untuk menciptakan kesatuan dan kerukunan yang kokoh demi terbentuknya perguruan tinggi Islam di Kota Makassar. Ini adalah salah satu perbedaan jelas yang ada pada tahun tersebut dibandingkan dengan kenyataan yang kita lihat sekarang. Organisasi-organisasi yang mengatasnamakan Islam sebagai dasarnya terlihat berlomba-lomba mendirikan perguruan tinggi dengan label organisasinya. Tokoh atau Pengurus UMI dari Sumatra Barat memiliki peran penting dalam pembentukan dan pendirian UMI di Kota Makassar. Diutusnya beberapa orang ke Makassar dari Kementerian Penerangan Agama, merupakan cikal bakal berdirinya UMI, karena pencetus berdirinya perguruan tinggi Islam di Kota Makassar adalah Nazaruddin Rachmat yang notabene berasal dari Sumatera Barat begitu pun dengan Muhammad Yusuf Samah yang menjadi Ketua Umum Yayasan Wakaf UMI. Hal ini tidak diragukan lagi mengingat bahwa Sumatra merupakan daerah kawasan Islam, dimana Islam pertama kali disyiarkan dari bagian barat In-

donesia sana.

Pembangunan Kampus satu UMI

Pada tahun 1956 diadakan rapat pengurus yang membicarakan tentang tanah untuk mendirikan gedung perkuliahan, kantor, rumah-rumah guru, masjid kampus dan lainnya. Hasil rapat memutuskan Naziruddin Rahmat ditunjuk membentuk satu delegasi untuk menghadap kepada Raja Gowa Andi Idjo Karaeng Lalolang. Lalu dibentuklah delegasi yang terdiri dari 10 orang anggota ialah KH. Muhammad Ramli, Sun Bone, Sutan Muhammad Yusuf Samah, Andi Patiwiri, Mochtar Lintang, Anwar Bey, Sewang Daeng Muntu, Makkareng Daeng Manjarungi, Ince Muhammad Ali Daeng Manyauru dan Naziruddin Rahmat.

Setelah bertemu, Raja Gowa kemudian menunjuk tanah persawahan di pinggir Jalan Raya Gunungsari. Tidak lama kemudian Ince Muhammad Ali Daeng Manyauru selaku anggota dewan pembangunan menunjuk tanah di bawah kuasanya yang amat strategis di dalam kota, dekat Stadion Matoanging di Jalan Kakatua. Tanah ini berasal dari tanah kepunyaan orang Belanda yang bernama Messman. Tanah tersebut luasnya lebih satu hektar yaitu 11.100 meter.

Tanggal 25 Maret 1956 tanah ini diakta-notariskan oleh Ince Muhammad Ali Daeng Manyauru dengan akta notaris Richard Claproth. Setelah itu seluruh anggota pengurus Wakaf UMI terlebih dewan keuangan dan dewan pembangunan mengerahkan tenaga untuk berupaya melaksanakan tugas masing-masing. Lalu Andi Patiwiri bersedia menjadi pelaksana dalam mewujudkan cita-cita pembangunan gedung induk UMI yang berada di kampus satu UMI. Pada tanggal 17 Maret 1957 dilakukan peletakan batu pertama bagi gedung induk UMI yang terletak di Jalan Kakatua no. 27, Makassar di atas tanah yang diwakafkan oleh Ince Muhammad Ali. Peletakan batu pertama dilaku-

kan oleh Gubernur yang diwakili oleh Abdul Razak Daeng Patunru. Selesai peletakan batu pertama diiringi dengan sepatah kata oleh Naziruddin Rahmat, kemudian ditutup dengan doa oleh KH. Muhammad Ramly.

Sejak berdirinya Yayasan Wakaf UMI hingga pembangunan kampus satu merupakan suatu proses yang panjang dan memakan banyak tenaga, waktu dan pikiran dari tokoh-tokoh yang memperjuangkannya. Tetapi di situlah letak kesakralitasan sejarahnya yang patut dihargai dan diukir dalam hati sanubari. Proses yang panjang itu akhirnya menghasilkan sesuatu bagi Makassar. Berkat kegigihan, upaya dan usaha para *founding father* akhirnya UMI secara resmi terbentuk dengan dua fakultas yaitu Fakultas Agama Islam dan Fakultas Ilmu Masyarakat.

Proses panjang berdirinya UMI merupakan suatu pertanda penting pada saat itu, bahwa perbedaan golongan, partai, organisasi bahkan etnis bukanlah penghalang demi terbentuknya suatu perguruan tinggi Islam di Makassar. Tidak bisa dipungkiri adanya peranan orang-orang Sumatra yang sangat besar dalam pembentukan dan pendiriannya, mulai dari pencetusan ide, perencanaan pembentukan, penyusunan struktur kepengurusan sampai pada terpilihnya salah satu dari mereka sebagai presiden pertama UMI.

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA: DARI KRISIS KE KRISIS

Universitas Muslim Indonesia dalam perjalanannya tentu pernah mengalami masa kritis, masa terjadi guncangan yang bisa berdampak pada eksistensinya. Berbagai macam masalah tentu saja bisa datang dari mana saja baik itu internal maupun eksternal, salah satu contohnya terjadi diawal berdirinya, tepatnya ketika gerakan Permesta melakukan pemberontakan terhadap pemerintah pusat. Dua orang dari petinggi UMI ditangkap dan ditawan

karena termasuk anggota Permesta. Parahnya lagi, Mochtar Lintang termasuk dari dua orang tersebut karena perannya sebagai Menteri Agama dalam kabinet PRRI/Permesta dan Naziruddin Rahmat sebagai anggota Menteri Agama.

Penangkapan itu berdampak pada terbengkalainya beberapa urusan yang berhubungan dengan UMI dan mengharuskan para bawahannya memilih pengganti Mochtar Lintang secepatnya. Keadaan yang kosong tersebut membuat UMI berbalik lagi seperti semula, merayap dan sedikit demi sedikit mencoba untuk bangkit dan melakukan restabilisasi agar tidak terjadi kekosongan yang berkepanjangan.

Setelah melalui berbagai proses, akhirnya terpilihlah Abdurrahman Shihab sebagai presiden kedua UMI menggantikan Mochtar Lintang. Tetapi pada tahun 1964 ketika Abdurrahman Shihab menjabat sebagai presiden UMI, terjadi krisis yang kedua yang harus dihadapi oleh UMI. Supaya lebih diletakkan pada konteks, maka akan dijelaskan gambaran tentang konteks politik di Sulawesi, kemudian dijelaskan juga biografi dua presiden UMI yakni Mochtar Lintang dengan kegiatan politiknya (PRRI/PERMESTA), dan Abdurrahman Shihab, dari stabilitas ke krisis UMI.

Konteks Daerah Sulawesi

Tahun 1950 menjadi saksi bisu atas berbagai peristiwa yang terjadi di Sulawesi. Di satu sisi di tahun 1950 adalah Sulawesi yang dinamis, multi-etnis, sedangkan di sisi lain di tahun 1950 merupakan masa yang kelam bagi sebagian orang karena pemberontakan di daerah-daerah pelosok. Penyebabnya tentu saja karena protes terhadap sistem sentralisasi pemerintah pusat. Pemberontakan tersebut dikenal dengan gerakan Permesta dan (DI/TII) yang ingin menjadikan Islam dan Pancasila sebagai ideologi dasar, dimana Kahar Muzakkar sebagai pimpi-

nannya.

Pemberontakan ini bermula dari suatu perselisihan mengenai pengakuan status militer dan mengenai adanya suatu tuntutan akan sebuah keadilan yang diinginkan para pejuang Sulawesi yang menuntut agar mereka diterima di TNI (Tentara Nasional Indonesia). Kemudian dua tuntutan ini digabungkan dalam suatu desakan yang disebut (KGSS) agar mereka diakui sebagai suatu divisi atau dalam satu kesatuan Brigade Hasanuddin, di bawah komando Letnan Kolonel Kahar Muzakkar.

Akibat pemberontakan tersebut sangat signifikan dalam berbagai segi kehidupan, diantaranya berbagai akses jalan menuju kota Makassar dan sebagainya terhambat bahkan tertutup karena terjadi pemberontakan. Selain itu, banyak penduduk yang melakukan migrasi karena merasa tidak aman, yang sewaktu-waktu bisa saja menjadi korban pemberontakan.

Jadi krisis internal di pelosok Sulawesi yang kompleks inilah yang menjadi salah satu tanda bahwa konteks Sulawesi tidak hanya mengenai berbagai perkembangan pembangunan yang terus dilakukan, tapi di sisi lain ada hal yang paling mendesak yang harus cepat diselesaikan agar tidak terjadi perpecahan, dalam hal ini pemberontakan yang dilakukan oleh Kahar Muzakkar. Di antara berbagai pemberontakan yang terjadi di Sulawesi, tersebutlah Mochtar Lintang salah satu yang terlibat dalam gerakan tersebut.

Mochtar Lintang Presiden UMI dan Kegiatan Politikanya

Mochtar Lintang berasal dari Aceh pernah bersekolah di Al-Azhar dan mendapatkan gelar masternya di sana. Di Kota Makassar Mochtar Lintang ditugaskan di bagian Pendidikan Agama Daerah VIII sebagai Inspektur.

Dengan menjabat sebagai Inspektur Pendidikan Agama Daerah VIII, Mochtar

Lintang menduduki pula jabatan presiden pertama UMI. Pengangkatan tersebut bukanlah tanpa alasan, tentu saja karena Mochtar Lintang adalah seorang dengan kualifikasi tertinggi. Mochtar Lintang adalah lulusan master dari Universitas Al-Azhar di Mesir. Adanya hubungan pertemanan antara Mochtar Lintang dan Naziruddin Rahmat sepertinya juga turut memberikan peluang bagi Mochtar Lintang untuk menduduki jabatan presiden UMI.

Sepertinya keterlibatannya dalam dunia politik membuatnya hanya bisa fokus pada dunia barunya, dan meninggalkan tugasnya sebagai seorang presiden dari suatu perguruan tinggi. Protes yang dilakukan oleh gerakan-gerakan pemberontakan daerah terhadap pemerintah pusat, memunculkan nama Permesta di pertengahan tahun 1950 dan menambah daftar panjang gerakan pemberontakan khususnya di daerah Sumatra dan Sulawesi.

Indonesia bagian Timur menjadi tempat kedua berlangsungnya penyusunan rencana dan langkah-langkah Permesta setelah Sumatra. Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara Barat, di samping Irian Barat (yang masih berada di bawah kekuasaan Belanda) merupakan bagian dari Indonesia Timur yang berada dalam satu komando militer teritorial TT-VII/Wirabuana. Makassar merupakan markas besar dari empat komando resimen infantri yaitu Pare-Pare, (Sulawesi Selatan), Manado (Sulawesi Utara), Ambon (Maluku Selatan) dan Denpasar (Bali dan Nusa Tenggara). Dalam unit administratif sipil dan militer terjadi persaingan dan ketegangan yang sangat kuat, sampai bisa mempengaruhi dinamika politik yang terjadi di antara Indonesia Timur dan Jakarta. Akan tetapi atas nama Indonesia Timur, pemberontakan Permesta resmi diumumkan pada tanggal 2 Maret 1957 di Makassar, yang juga menjadi daerah inti dari gerakan ini.

Di tengah kemelut yang dihadapi setelah kemerdekaan, memang banyak memunculkan masalah yang rumit. Sulawesi sendiri (Permesta) di samping mempersiapkan langkah-langkah perencanaan untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah pusat, juga sedang menghadapi masalah internal yaitu adanya pemberontakan besar-besaran yang dilakukan oleh Kahar Muzakkar dan permintaan rakyat Minahasa di Utara untuk memisahkan diri dengan membentuk provinsi sendiri. Rencana ini disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri pada Januari 1956, dan bulan September Andi Pangeran Petta Rani melakukan pertemuan di Manado guna memastikan pandangan partai-partai politik Sulawesi Utara mengenai saran tersebut. Menurut pers Manado pada saat itu, semua partai lebih suka jika dilakukan pembagian Sulawesi ke dalam dua provinsi. Karena menurut semua partai tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika pembagian tersebut dilakukan, apalagi kantor-kantor cabang untuk provinsi Sulawesi Utara sudah dipersiapkan.

Ketika kabar tentang pemisahan Sulawesi menjadi dua provinsi tersebar, rakyat di bagian Selatan Sulawesi pun merasa campur aduk. Di satu sisi mereka merasa bahwa jika kabar tersebut benar adanya, maka dominasi orang-orang Minahasa dalam dinas sipil akan berkurang, tapi di sisi lain akan mengakibatkan kepincangan ekonomi karena sumber utama ekonomi –dalam hal ini produksi Kopra– berpusat di Sulawesi Utara. Sedangkan pemberontakan yang dilakukan oleh Kahar Muzakkar pada tahun 1955-1965 merupakan sejarah panjang perlawanan internal rakyat Selatan.

Kira-kira dua permasalahan inilah yang muncul di tengah berlangsungnya gerakan Permesta. Bagi menggunakan kesempatan dalam kesempatan, ternyata dipusatkannya gerakan Permesta di Sulawesi ditafsirkan sesuai dengan ke-

pentingan-kepentingan daerah yang lebih khusus. Di Selatan misalnya, menggunakan kesempatan tersebut untuk menggakhiri pemberontakan Kahar Muzakkar dan di Utara untuk menguasai perdagangan kopra.

Di tahun 1957 Permesta yang dibentuk di Makassar menghasilkan beberapa poin tuntutan kepada pemerintah pusat. Letnan Kolonel H.N.V. Sumual dan Saleh Lahade tampil sebagai tokoh utama dalam gerakan ini. Perjuangan panjang yang terjadi sepanjang tahun menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai pihak. Permesta dengan tekad yang kuat untuk mewujudkan tujuan-tujuannya mampu bertahan di tengah kemelut dan pertempuran tersebut.

Tanggal 9-13 Januari 1958, Sumual mengadakan rapat bersama para perwira pembangkang Sumatra yaitu Simbolon, Lubis, Husein, Barlian, Dahlan Djambek dan para politisi sipil yaitu Dr. Sumitro Djohohadikusumo, Sjafruddin Prawirane-gara, dan Muhammad Natsir. Dengan keputusan akhir bahwa jika pemerintah pusat tidak menyetujui tuntutan kaum pemberontak maka akan dibentuk pemerintahan tandingan. Sebuah ultimatum untuk Presiden dan pemerintah dikeluarkan di Padang, 10 Februari oleh Husein dan Simbolon dengan nama "Piagam Perjuangan untuk Menyelamatkan Negara". Ultimatum tersebut menuntut agar Kabinet Djuanda mendundurkan diri dan dibubarkan, Soekarno kembali kekedudukannya sebagai presiden konstitusional, Hatta serta Sultan Hamengkubuwono ditunjuk membentuk "zaken-kabinet" yang terdiri dari orang-orang jujur, terhormat, mampu, dan tidak memasukkan "unsur-unsur anti-agama" ke dalamnya.

Ultimatum tersebut tidak diindahkan oleh Presiden dan pemerintah pusat. Sehingga pada tanggal 15 Februari 1958 diumumkanlah terbentuknya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang. PRRI terdiri dari Ko-

lonel J.F. Warouw sebagai Menteri Pembangunan dan Industri, Letnan Kolonel Saleh Lahade sebagai Menteri Penerangan, Mochtar Lintang (anggota Dewan Tertinggi Permesta) sebagai Menteri Agama, Letnan Kolonel H.N.V Sumual sebagai panglima angkatan darat dan Naziruddin Rahmat sebagai anggota PRRI. Permesta yang dahulunya tidak pernah berniat melakukan pemberontakan bersenjata akhirnya mau tidak mau harus melakukannya karena diserang lebih awal oleh pemerintah pusat. Proklamasi PRRI, akhirnya menimbulkan pro-kontra di dalam tubuh internal anggota Permesta sendiri, banyak perwira yang menderita tekanan batin karena sebagian dari mereka merasa bahwa keteguhannya mendukung tuntutan-tuntutan Piagam Permesta yang tidak terpenuhi itu, yang telah mereka tanda tangani setahun sebelumnya, mengharuskan mereka mendukung PRRI.

Perdebatan sengit pun terjadi dengan hasil akhir bahwa Komando Daerah Militer-Sulawesi Utara dan Tengah (KDM-SUT) harus bersikap netral dan jika mungkin, bertindak sebagai penengah antara pemerintah pusat dan kolonel-kolonel pemberontak. Tetapi, kenetralitasan ini menjadi sulit setelah penunjukan Saleh Lahade sebagai Menteri Penerangan dalam kabinet PRRI. Seorang perwira bernama Mayor A. Lathief (Pendukung kuat Saleh Lahade) memutuskan akan memindahkan Saleh dari kota ke tempat yang lebih aman di luar kota, yaitu ke Barru. Rupanya pada saat yang bersamaan Mochtar Lintang juga dipindahkan ke Barru.

Tanggal 16 Februari 1958, Kepala Staf Nasution mengeluarkan ultimatum kepada Warouw, Saleh Lahade dan Mochtar Lintang bahwa dalam tiga hari mereka harus melaporkan statusnya dalam kabinet PRRI, apakah mereka menerima atau tidak jabatan tersebut. Saleh tidak memberikan jawaban atas ulti-

matum tersebut, khawatir jika ia menjawab akan terjadi bentrokan antara kekuatan-kekuatan yang pro dan yang anti terhadap Permesta. Tetapi akhirnya dalam deretan kemunduran, keduanya ditangkap pada tanggal 20 Mei di Makassar, yang juga menandai berakhirnya dukungan Sulawesi Selatan terhadap PRRI/Permesta.

Penangkapan tersebut bermula ketika diketahui adanya kerjasama yang dilakukan bersama Darul Islam. Andi Muhammad Jusuf Amir pada tanggal 12 Mei berangkat ke Jakarta menemui Kepala Staf Nasution "mewakili Panglima Mattalatta" untuk melaporkan tentang kerjasama antara PRRI/Permesta dan Darul Islam di Sulawesi Selatan. Sebagai pengganti Andi Mattalatta, Jusuf diangkat sebagai panglima dan berhasil menangkap Saleh Lahade, Mochtar Lintang dan tiga orang sekutunya. Tiga sekutu ini turut dalam perundingan dengan Kahar Muzakkar yaitu Kapten W.G.J Kaligis yang bekerja di Sekretariat Team Bantuan Pemerintah Militer, Kapten Anwar Bey seorang anggota Korps Kerohanian KADIT dan Naziruddin Rachmat dari Penerangan Agama propinsi Sulawesi dan Mochtar Lintang Inspektorat Pendidikan Agama.

Tanggal 20 Mei 1958 Anwar Bey, Naziruddin Rahmat dan Mochtar Lintang meninggalkan UMI. Saleh Lahade dan Mochtar Lintang ditahan di Makassar hingga November 1958. Mula-mula dikirim ke Denpasar dan kemudian ke Madiun tempat mereka ditahan hingga 1962, lalu mereka dikirim ke Jakarta dan Madiun hingga tahun 1962.

Begitulah sekiranya keterlibatan-keterlibatan yang dilakukan oleh Mochtar Lintang. Hilangnya dia dari kota Makassar sampai pada pembuangan dan pengasingan ke berbagai tempat di Indonesia adalah salah satu bentuk cintanya kepada Republik Indonesia di satu sisi, tapi di sisi yang lain tidak seharusnya se-

orang Mochtar Lintang meninggalkan tanggung jawabnya sebagai presiden UMI.

Abdurahman Shihab: Stabilitas dan Krisis UMI

Menengok kembali pada kekosongan jabatan presiden UMI, adalah hal yang paling utama bagi para pengurus dan staf Yayasan Wakaf mencari pengganti Mochtar Lintang. Maka Andi Pangeran Petarani selaku ketua badan Wakil UMI dalam usahanya mengantisipasi kondisi tersebut, yaitu dengan membentuk presidium dan menunjuk A. Waris sebagai ketua presidium, Drs. Ince M Salman sebagai sekretaris, dan dilengkapi dengan beberapa anggota yaitu Prof. Mr. Sutan Muhammad Syah, H. Baedhawi, A. Darwis Zakaria dan Mr. Anang Djaja Prawira.

Pada kesempatan ini Drs. Ince M. Salman bertindak selaku pimpinan sementara UMI sebelum dipilihnya presiden (pimpinan) yang defenitif. Setelah melalui proses pemilihan, akhirnya keluarlah nama Abdurahman Shihab sebagai presiden terpilih UMI untuk periode 1959-1965. Untuk memperlancar tugasnya, beliau didampingi oleh Mr. Lestahulu selaku sekretaris. Akan tetapi, selama periode tersebut jabatan sekretaris mengalami dua kali pergantian. Mr. Lestahulu digantikan oleh Mr. Hadi Maddatoeng pada tahun 1962-1963 kemudian berganti lagi pada tahun 1963-1965 oleh Drs. H. M Alie Sullaeman.

Abdurahman Shihab adalah seorang keturunan Arab, lahir di Makassar pada tanggal 15 Januari 1915. Istrinya berasal dari Sidrap dan dikaruniai sebelas orang anak, yaitu Nur Shihab, Ali Shihab, Umar Shihab, Quraish shihab, Warha Shihab, Alwi Shihab, Nizah Shihab, Muhtar Shihab, Salwa Shihab, Ulfa Shihab, dan Lahfa Shihab, dan Lima diantaranya dilahirkan di Sidrap, yang juga merupakan kota kelahiran istrinya.

Salah satu alasan Abdurrahman

Shihab terpilih sebagai presiden UMI, karena beliau mempunyai pengalaman pendidikan yang panjang. Selain itu beliau seorang anak yatim, ketika itu pamannya yang berada di Jakarta mengajak Abdurrahman Shihab untuk disekolahkan di *Jami'al* yang juga terletak di Jakarta. Abdurrahman Shihab pun pernah mengenyam pendidikan di bangku Madrasah Aliyah selama dua tahun dan pernah mendapatkan beasiswa *Takhassus Al-Qur'an* selama satu tahun.

Di sisi lain bahwa dengan ditangkanya orang-orang Sumatra Barat seperti Mochtar Lintang dan Naziruddin Rahmat, hilanglah pengaruh orang-orang Sumatra Barat di UMI. UMI kemudian diharapkan ditangani oleh orang Sulawesi. Permasalahannya, tidak ada orang Sulawesi yang berlatar belakang ilmu (Agama Modern). Dalam pencarian tersebut didapatlah Abdurrahman Shihab meskipun dia bukan aktifis UMI selama ini. Abdurrahman Shihab dipilih selain karena orang lokal, juga karena dianggap netral. Tapi anggapan ini masih sementara, apapun nanti kelak akan mendapatkan informasi lebih lengkap.

Riwayat pekerjaan-pekerjaan yang pernah beliau pegang selama hidupnya yaitu sebagai guru agama, pengusaha beras, dan termasuk salah satu pendiri UMI sekaligus mantan rektor UMI, serta staf pengajar di IAIN sekaligus sebagai mantan rektor, pernah pula bekerja di sebuah Yayasan Pendidikan, Pengajaran dan Sosial Organisasi Jiwa dan menjabat sebagai ketua yayasan. Jadi kesibukan beliau tidak terbatas pada instansi saja, di luar instansi pun beliau menyibukkan diri dengan mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Pada tahun 1960 UMI membuka satu fakultas baru yaitu Fakultas Ilmu Publisistik untuk memenuhi persyaratan sebagai universitas. Dengan adanya fakultas baru tersebut, UMI telah mem-

bina tiga fakultas, masing-masing Fakultas Guru Agama dan Fakultas Hakim Agama, dan terakhir Fakultas Ilmu Publisistik.

Pada tahun 1961, beberapa fakultas yang ada di UMI diubah menjadi masing-masing: Fakultas Guru Agama diubah menjadi Fakultas Tarbiyah, Fakultas Hakim Agama diubah menjadi Fakultas Syariah dan Fakultas Publisistik diubah menjadi Fakultas Agama Islam. Pada tanggal 11 November 1962, satu fakultas baru kembali dibuka yaitu Fakultas Ekonomi oleh Abdurrahman Shihab. Fakultas ini dipimpin oleh Drs. Faisal Sadaqah selaku Dekan dan Latanro sebagai Sekretaris.

Pada saat yang sama di Kota Makassar, mulai dirintis pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Menurut buku yang berjudul *Perguruan Tinggi Agama Islam Di Indonesia* yang ditulis oleh Mastudi dan Marzuki Wahid, dikeluarkannya peraturan presiden No. 11 tahun 1960, tertanggal 9 Mei 1960 untuk membentuk IAIN. Pada tanggal 24 Agustus 1960 Menteri Agama Wahib Wahab meresmikan pembukaan IAIN di Gedung Kepatihan Yogyakarta. Tahun 1963 berdasarkan peraturan Presiden, Menteri Agama mengeluarkan surat keputusan No. 49 tanggal 25 Februari 1963 mengenai pemisahan IAIN menjadi dua institut yang berdiri sendiri. Pertama berpusat di Yogyakarta dengan nama IAIN Sunan Kalijaga dan yang kedua berpusat di Jakarta dengan nama IAIN Syarif Hidayatullah. Langkah ini diikuti dengan pengaturan pembagian wilayah antara kedua IAIN tersebut. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengkoordinir fakultas-fakultas yang berada di wilayah timur meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengkoordinir fakultas-fakultas di wilayah barat, yaitu Jakarta Raya, Jawa Barat, dan Su-

matra.

Di Kota Makassar tanggal 30 Oktober 1962 didirikan Fakultas Syariah yang adalah cabang dari IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta, dan Fakultas Tarbiyah di resmikan pada 7 November 1964. Kedua fakultas ini sebelum dimasukkan menjadi IAIN merupakan Fakultas dalam lingkungan UMI. Alasan diintegrasikannya Fakultas Tarbiyah dan Syariah karena dua fakultas ini ingin dijadikan fakultas negeri oleh Abdurrahman Shihab, sehingga pada tanggal 7 November 1964 dua fakultas ini menjadi fakultas negeri di IAIN.

Dengan demikian pada tahun 1964/1965, UMI hanya membina satu fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi. Adanya kecenderungan akan diintegrasikannya secara keseluruhan ke IAIN, menimbulkan kekhawatiran di kalangan para mahasiswa. Apabila ini terjadi maka UMI tidak akan menjadi institusi pendidikan yang mandiri. Inilah krisis UMI dimana ada kekhawatiran di kalangan mahasiswa. Untuk keluar dari masalah ini beberapa diantara mahasiswa Fakultas Ekonomi berinisiatif untuk menghubungi Yayasan Wakaf, dengan mengajukan sebuah pernyataan bahwa mereka atas nama mahasiswa menyatakan tidak setuju terhadap rencana pengintegrasian UMI dengan IAIN secara keseluruhan.

Andi Pangerang Pettarani selaku Ketua Yayasan Wakaf UMI menerima delegasi mahasiswa Fakultas Ekonomi. Dipimpin Fakhruddin Matto selaku Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi bersama Rasyid Patingari sebagai ketua I Dewan Mahasiswa, serta Dahlan Kasim bersama-sama melakukan pertemuan. Adapun hasil pertemuan itu adalah memufakati untuk dipertahankannya keberadaan UMI dengan mengangkat La Tunrung menjadi Rektor UMI. Inilah awal mula pembicaraan mengenai pergantian presiden UMI. Pergantian Presiden kedua menandai bera-

akhirnya penggunaan istilah Presiden untuk penyebutan pimpinan tertinggi UMI, digantikan dengan istilah Rektor.

Sejak berdirinya UMI hingga masa Presiden kedua Abdurrahman Shihab mengalami kondisi krisis terus-menerus. Krisis pertama terjadi ketika Mochtar Lintang terlibat dalam PRRI/Permesta, yang mengakibatkan tertangkapnya beliau dan meninggalkan kekosongan di UMI. Krisis kedua terjadi ketika Abdurrahman Shihab menjabat. Ketika itu rencana Abdurrahman Shihab menggabungkan fakultas-fakultas UMI ke IAIN, menimbulkan protes di kalangan mahasiswa sehingga membuat kevakuman dalam proses perkuliahan.

KESIMPULAN

UMI dalam perkembangannya telah mengalami bermacam-macam peristiwa, yang menandai betapa pentingnya sejarah kelahirannya. Bukan berarti hanya sekadar tahu, tetapi untuk benar-benar diambil pelajaran, bahwa betapa tangguhannya tokoh-tokoh yang memberikan kesungguhannya dalam mendirikan UMI.

Bermula dari ide membangun Universitas Islam di Makassar oleh Prof. Huzairin yang merupakan seorang tokoh intelektual Islam di Jakarta dan merupakan salah satu pengurus Universitas Islam Djakarta (UID). Lalu diteruskan membangun Universitas Muslim Indonesia di Makassar oleh Naziruddin Rahmat yang merupakan utusan dari Kementerian Agama yang dikirim ke Makassar.

Tahun 1952 Naziruddin Rahmat untuk pertama kalinya menemui raja-raja di Sulawesi, dengan bantuan Kapten Anwar Bey, H. Sewang Daeng Muntu, dan Muhammad Yusuf Samah. Raja-raja yang mereka temui adalah Andi Mapanyukki (Raja Bone), Andi Djemma (Raja Luwu), Andi Idjo (Raja Gowa) dan Pajonga Karaeng Polongbangkeng. Selain menemui para raja mereka juga menemui Gubernur Sulawesi yakni Sudiro,

Walikota Makassar Ahmad Dara Syahrudin, dan para alim ulama.

Pada Tanggal 8 Februari 1953 rapat dan pembentukan panitia susunan pengurus Yayasan Wakaf UMI pertama kali diadakan. Lalu 28 Februari 1953 struktur kepengurusan Yayasan Wakaf UMI dibentuk. Pada pertengahan tahun 1953 kuliah pertama sudah diadakan yang bertempat di emperan Kantor Penerangan Agama Propinsi Sulawesi di Jalan Karebosi. Di Tanggal 23 Juni 1954 diresmikanlah UMI dan tahun 1955 pengesahan terbentuknya Yayasan Wakaf UMI. Pada 17 Maret 1957 dilakukan peletakan batu pertama bagi gedung induk UMI yang terletak di Jalan Kakatua no. 27 Makassar dan merupakan kampus pertama UMI.

Begitu besar keinginan para pendiri UMI untuk mendirikan sebuah Perguruan Islam di Makassar, sampai-sampai segala bentuk latar belakang seperti politik harus dibuang jauh-jauh. Tidak hanya itu, segala bentuk kepentingan-kepentingan individu atau kelompok tidak termasuk dalam hitungan ini. Mengingat pengurus UMI dilihat dari latar belakangnya masing-masing merupakan anggota dari berbagai macam partai. Selain itu berbagai macam-ethnis, baik itu dari Minangkabau, Bugis, Makassar dan sebagainya. Mochtar Lintang berasal dari Sumatra Barat menjadi Presiden pertama di UMI.

Mochtar Lintang yang dipercayakan menjadi Presiden pertama UMI tidak menyelesaikan masa periodenya. Hal ini dikarenakan keikut-sertaannya dalam gerakan PRRI/Permesta. Inilah periode krisis pertama di UMI. Presiden kedua Abdurrahman Shihab mendapatkan tentangan dari para mahasiswa karena kebijakan yang dibuatnya yakni menyatukan fakultas-fakultas yang ada di UMI dengan yang ada di IAIN, dan merupakan krisis kedua yang terjadi di UMI. Terlepas dari itu semua, UMI dengan segala perkem-

bangannya telah berhasil melalui berbagai krisis masa lalu, sekalipun krisis tersebut tidak bisa dianggap sepele. Karena bagaimanapun juga peristiwa-peristiwa tersebut merupakan bagian dari sejarah UMI.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifah Siddhiq dkk (Editor). 1994. *Menerobos Krisis Mengukir Prestasi*. Ujung Pandang: Pusat Dokumentasi Informasi dan Kajian Ilmiah.
- Direktori. 1995. *Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah IX*. Ujung Pandang: Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah IX.
- Hamid Abdullah. 1991. *Andi Pangeran Pettarani*. Jakarta: Grasindo.
- Harvey, Barbara Sillars. 1984. *PERMESTA: Pemberontakan setengah hati*. Jakarta: Grafiti.
- Harvey, Barbara Sillars. 1989. *Pemberontakan Kahar Muzakkar dari tradisi ke DI/TII*. Jakarta: Grafiti.
- Kementerian Penerangan. 1952. *Republik Indonesia Propinsi Sulawesi*. Jakarta: Kementerian Penerangan.
- Mardanas Safwan & Sutrisno Kutoyo (Editor). 1981. *Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mastudi dan Marzuki Wahid. 2003. *Perguruan Tinggi Agama Islam Indonesia, Sejarah pertumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Mastudi HS dan Marzuki Wahid. 2003. *Perguruan Tinggi Islam di Indonesia sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan agama Islam.
- Mattualada. 1983. "Islam di Sulawesi

Selatan”, dalam Taufik Abdullah (Editor). *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali.

Batu Putih pada tanggal 14 Juni 2012.

Muhammad Nastain (Editor). 2000. *Alwi Shihab Mengemban Tuntutan Jaman*. Yogyakarta: Wahyu Pustaka.

Nasaruddin Koro. 2009. *Makassar terkenang Masa Lalu*. Jakarta: Mitracard Grafika.

Naziruddin Rahmat. 1990. “Mendirikan Sebuah Universitas di Makassar”Universitas Muslim Indonesia”. *Manuskrip*.

Timothy & dkk. 2008. *Profil UIN Alauddin 2008*. Makassar: Alauddin Press.

Koran

“Pemberitahuan P.T. Makassar”, *Marhaen*, 2 Januari 1960. hlm. 3.

“Kewajiban Puasa”, *Marhaen*, 24 Februari 1959.

“Pemberitahuan”, *Marhaen*, 24 Desember 1959.

“PENGUMUMAN”, *Marhaen*, 13 Juli 1959, hlm. 4.

“Wakaf Pembangunan Universiteit Muslim Indonesia”, *Pedoman Rakyat*, 10 Februari 1953, hlm. 3.

“Wakaf Pembangunan Universiteit Muslim Indonesia”, *Pedoman Rakyat*, 10 Februari 1953, hlm. 10

Wawancara

Abdul Rahim Amin, wawancara di Kampus Satu UMI, 13 September 2011.

Ahmad Dara Sjahrudin, wawancara di rumah kediaman jalan Kenari No. 4, 24 Juni 2013.

Amir Syaifa Yasin, wawancara di kantor DDII Jakarta Pusat, 17 Oktober 2011.

Mansyur Ramly, wawawancara di Kampus Satu UMI, 12 Desember 2011.

Umar Syihab, dikediaman Jalan Gunung